e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

SISTEM POLITIK KERAJAAN BUNGKU: 1908-1961

Oleh:
Fatma
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Haluoleo
(Email: fatma88@uho.ac.id)

Abstract

This paper aims to explain the transformation of the political system in the Bungku Kingdom, one of the kingdoms that once existed in the eastern part of Sulawesi. The year 1908 was chosen as the initial boundary of the research because, at the time, the Bungku Kingdom was "independent" from the rule of the Sultanate of Ternate. While 1961 was chosen as the final limit of the study because, this year, the history of the Bungku kingdom ended along with the abolition of the autonomous region in Central North Sulawesi Province. This study uses the historical method in the form of heuristic stages, followed by the source criticism, interpretation, and historiography. The primary data source was the collection of the National Archives of the Republic of Indonesia and contemporary magazines. The source of secondary data was from the collections of several libraries and private collections. This study uses a functionally structural approach. The research found several facts about the political system transformation and regional reorganization in the Bungku Kingdom. Before 1908, the Bungku Kingdom was still a vassal of the Sultanate of Ternate. The influence of Ternate is by adopting the positions and government structure of the Sultanate of Ternate. The Bungku Kingdom merged into the Afdeeling Oost Celebes region, which was initially capitalized in Luwuk and then moved to Bau-bau. Since 1924, Bungku has been part of Afdeeling Poso. After independence, Bungku became part of the Poso Regency, Central Sulawesi Province.

Keywords: Bungku Kingdom, Political System, Functional Structural

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang transformasi sistem politik di Kerajaan Bungku, salah satu kerajaan yang pernah eksis di wilayah Sulawesi bagian Timur. Tahun 1908 dipilih menjadi batasan awal penelitian sebab pada tahun ini Kerajaan Bungku “merdeka” dari kekuasaan Kesultanan Ternate. Sementara tahun 1961 dipilih sebagai batasan akhir studi sebab pada tahun ini riwayat kerajaan Bungku berakhir seiring dengan penghapusan wilayah swapradja di wilayah Propinsi Sulawesi Utara Tengah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berupa tahapan heuristik, kemudian dilanjutkan dengan tahapan kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Data primer diperoleh dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia dan majalah sezaman. Sementara data sekunder diperoleh dari koleksi beberapa perpustakaan dan koleksi pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural fungsional. Penelitian menemukan beberapa fakta tentang transformasi sistem politik dan reorganisasi wilayah di Kerajaan Bungku. Sebelum tahun 1908, Kerajaan Bungku masih berstatus sebagai vazal Kesultanan Ternate. Pengaruh Ternate terlihat jelas dengan mengadopsi jabatan dan struktur pemerintahan Kesultanan Ternate. Kerajaan Bungku lalu digabungkan ke dalam wilayah *Afdeeling Oost Celebes* yang mula-mula beribukota di Luwuk lalu dipindahkan ke Bau-bau. Sejak tahun 1924, Bungku menjadi bagian *Afdeeeling* Poso. Hal ini kemudian menjadi dasar sehingga pascakemerdekaan, Bungku menjadi bagian dari Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah.

Kata Kunci: Kerajaan Bungku, Sistem Politik, Struktural Fungsional

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

1. PENDAHULUAN

Bungku adalah salah satu kerajaan penting di Sulawesi bagian Timur. Sejak abad 16, wilayah ini telah menjadi rebutan dari penguasa-penguasa di sekelilingnya, terutama Kesultanan Ternate, Kerajaan Bone dan Luwu. Sumber daya alam yang melimpah telah menjadi daya tarik bagi "negara" luar untuk menegakkan hegemoninya di wilayah ini. Sejak tahun 1580, Sultan Baabullah dari Ternate telah mengirimkan ekspedisi untuk menaklukkan Bungku. Selama berabad-abad kemudian Kerajaan Bungku tidak lepas dari bayang-bayang Kesultanan Ternate. Bungku berulangkali mencoba untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Ternate, akan tetapi selalu kalah dalam menghadapi kekuatan Ternate yang dibantu oleh kekuasaan kolonial Belanda tersebut. Ternate meninggalkan warisan kebudayaan yang penting bagi Kerajaan Bungku. Sistem politik Kerajaan Bungku mengikuti sistem politik Ternate, seperti jabatan, gelar dan fungsi dalam sistem birokrasi pemerintahan. Seiring dengan perubahan kekuasaan di Bungku, maka sistem politik di Bungku juga mengalami transformasi dan penyesuaian dengan sistem birokrasi baru tersebut.

Penelitian tentang wilayah Bungku telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Leonard Andaya dalam bukunya *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern World (1993)* menyampaikan bahwa Bungku merupakan salah satu daerah taklukan dan daerah periphery dari Kesultanan Ternate. Penelitian yang dilakukan oleh Eshter Joy Velthoen lebih menyoroti soal perdagangan, persaingan, perompakan dan ekpansi kolonial di wilayah Sulawesi Timur (Esther Joy Velthoen 2002; Esther J. Velthoen 1997, 367–88). Kajian yang lebih spesifik yang membahas tentang Kerajaan Bungku telah dilakukan oleh Syakir Mahid, Haliadi Sadi dan Wilman Darsono dalam buku *Sejarah Kerajaan Bungku* (Mahid, dkk: 2011). Penelitian ini penting dilakukan karena dari semua riset yang telah ada, belum satupun yang secara spesifik membahas sistem politik dan birokrasi di Kerajaan Bungku, sehingga gambaran tentang birokrasi pemerintahan di Kerajaan Bungku khususnya pada periode 1908 hingga penghapusan kerajaan pada tahun 1961 belum terjelaskan secara utuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fungsional struktural untuk menjelaskan tentang sistem politik di Kerajaan Bungku serta bagaimana transformasinya dalam kurun waktu 1908-1961. Unsur dalam sistem politik yang diamati, yaitu status dan peran berbagai jabatan dalam struktur birokrasi Bungku. Status dan peran tersebut tidak statis namun dapat berubah seiring dengan perubahan sistem birokrasi. Secara garis besar, sistem politik di Kerajaan Bungku dapat dibagi dalam empat periode. Periode ketika Bungku di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate yang berlangsung sejak 1580-1908, periode 1908-1924 di mana Kerajaan Bungku menjadi bagian dari wilayah *Afdeeling Oost Celebes*. Pada periode 1924-1942, Bungku menjadi bagian dari wilayah *Afdeeling* Poso. Periode 1942-1945, Bungku menjadi bagian wilayah kekuasaan Jepang dan periode pascakemerdekaan hingga penghapusan kerajaan pada tahun 1961.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yakni heuristik atau penelusuran sumber sejarah, kritik dan verifikasi sumber, interpretasi dan historigrafi. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran sumber di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Data yang diperoleh yaitu koleksi *microfilm* MVO 1e nomor Reel 35 tentang laporan pejabat kolonial tentang Kerajaan Bungku seperti *Nota Inzake het Landschap Boengkoe* oleh A.L. Nouwens, Civiel Gezaghebber Kolondale. Data-data lainnya diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, koleksi pribadi penulis dan sumber internet. Data-data yang ada melalui proses kritik untuk mendapatkan fakta sejarah yang kemudian diinterpretasi dan disusun menjadi satu narasi sejarah.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Latar Geografis dan Kondisi Demografis Kerajaan Bungku

Menurut data tahun 1932, daerah Bungku terletak antara 1^0 15' LS dan 3^0 30 detik LS 121^0 30' BT dan 123^0 BT. Daerah ini membentang sepanjang laut Maluku dari Tenggara sampai Barat Laut hingga teluk Mori, kemudian garis pantainya membelok ke arah timur Laut. Suatu sambungan geografis tidak membentuk daerah Bungku karena daerah Mori terletak di antara kedua daerah itu sebagai enclave. Di Barat daya dan sebelah Barat daerah Bungku dibatasi oleh daerah Laiwui *Onderafdeeling* Kendari, di Barat Laut oleh *Onderafdeeling* Malili, di utara oleh daerah Mori (*Onderafdeeling* Kolonodale) dan di Timur oleh daerah Banggai (Nouwens 1932).

Bungku terletak di Selatan sebuah teluk dalam yang disebut Tomori, dan memberi tempat di sekitar teluk yang suatu saat pernah berada di bawah penguasa Banggai namun telah dicaplok dari masa ke masa oleh Bungku. Pada tahun 1670 Padtbrugge menemukan Bungku sebagai sebuah pulau yang dihuni dengan baik, dengan 24 desa yang terletak di utara dan 27 desa di Selatan dari pemukiman kerajaan. Pada tiap-tiap desa memiliki penduduk sekitar 100-500 orang. Dari batas sebelah utara hingga pusat kerajaan di Bungku, ekspedisi Belanda tidak melihat apapun kecuali desa-desa dan tanah yang ditanami. Ada juga sejumlah orang Bajo, atau pengembara laut, di mana banyak di antara mereka hidup sepenuhnya atau sementara di pemukiman sepanjang pantai. Mereka telah sejak lama menjadi manusia perahu, namun kini banyak di antara mereka bertani dan mengikuti gaya hidup tetangga mereka Bungku. Negeri tersebut sangat subur. Masyarakat juga menanam beras, buncis, kacang tanah, jagung, dan banyak pohon dan tanaman akar lainnya. Para pedagang asing yang berhasrat untuk membeli berbagai tanaman harus membayar dengan barang-barang sebagai uang muka, bahkan ketika tanaman belum tumbuh sepenuhnya (Andaya 1993).

Lokasi Bungku memberikan akses yang mudah menuju pasar Bugis, Makasar, dan Tomini. Teluk bagian dalam ini hanya merupakan perjalanan sehari melalui darat ke Teluk Bone atau menuju Teluk Tomini. Dari sini perjalanan singkat bisa ditempuh menuju Mamuju di Mandar, dan kemudian ke arah selatan di pantai barat Sulawesi menuju Makasar. Sebagai salah satu pusat perdagangan sekunder di Indonesia bagian timur, Bungku mendapat reputasi di antara orang Belanda sebagai sebuah "tempat impian para penyelundup", dan bahkan pedagang Bugis dari Melaka sering kali mengunjungi pelabuhannya. Di Bungku, rempah-rempah, kulit penyu, lilin, tembakau, dan banyak produk lainnya dari timur dapat ditemukan dengan harga yang lebih rendah daripada barang-barang tersebut yang ditawarkan oleh Belanda. Pada suatu masa ketika VOC putus asa atas keterbatasan kulit penyu, Bungku memiliki suplai yang baik dari Togian dan Kepulauan Banggai.

Bungku memiliki jumlah besar bijih besi yang mudah didapat, di mana penduduk menggalinya dan melebur menjadi senjata atau peralatan atas permintaan. Pedang, pisau dan kampak Tobungku dihargai dengan sangat tinggi, terutama di antara penduduk Papua dan suku-suku pedalaman Halmahera dan Seram. Ada kelompok yang menolak memperdagangkan barang-barang mereka untuk alasan apapun kecuali peralatan besi. Secara kualitas, bijih besi dari Bungku dinilai oleh naturalis termasyhur abad ke-17 G. E. Rumphius lebih inferior jika dibandingkan dengan bijih besi yang ditemukan di dekat sekitar Danau Matano di Luwu, di mana "pedang lebih baik dan sebuah pedang bernilai lebih dari enam pedang Bungku." Orang-orang yang hidup di sekeliling danau ini begitu terampil dalam pengerjaan besi di mana Rumphius menganggap produk akhir menjadi sebaik baja. Upaya-upaya oleh Bungku untuk mengontrol perdagangan besi menyebabkan konflik dengan Luwu atas kontrol area Danau Matano.

Meskipun Bungku dianggap menjadi bagian pinggiran Ternate, hubungannya dengan pusat sering kali tegang. Sejak tahun 1699 Bungku menolak mengakui posisi Ternate. Sultan Ternate mengakui bahwa ia tidak dapat memaksa Bungku untuk patuh dengan keinginannya tanpa bantuan Kompeni, dan Sultan Ternate khawatir untuk melakukan berbagai tindakan melawannya karena takut

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

gagal dan kehilangan muka dengan wilayah lainnya di pinggiran. Keyakinan bahwa Bungku dapat memukul secara sukses berbagai serangan Ternate ditemukan dengan baik pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Bungku memiliki sejumlah besar manusia dan perahu, dan di dalam perairannya ia merupakan lawan yang berat. Lagi pula, Bone berhasrat untuk mengamankan ketergantungan sumber rempah-rempah dan budak. Tidak seperti tetangganya Banggai dan Butung, Bungku melanjutkan untuk menjalankan fleksibilitas dalam kebijakannya untuk keseimbangan permintaan dari Ternate dan kerajaan Bugis Bone (Andaya 1993).

Pada tahun 1705 penduduk daerah Bungku sudah mencapai jumlah 8.000 hingga 9.000 orang. Pada tahun 1908 penduduk yang mendiami Bungku dan sekitarnya yang terdiri atas 38 wilayah penduduknya telah berjumlah 2.563 jiwa. Namun, pada tahun 1906 juga disebutkan oleh Residen Manado bahwa penduduk Bungku sebanyak 15.000 jiwa dan Mori sebanyak 20.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1930, *Landschap Boengkoe* yang terdiri atas Distrik Bahodopi, Boengkoe, *Noord-Boengkoe*, Salabangka, dan Wosu memiliki penduduk masing-masing Bahodopi sebanyak 4.394 jiwa, Boengkoe sebanyak 5.193 jiwa, *Noord-Boengkoe* sebanyak 5.151 jiwa, Salabangka sebanyak 7.971 jiwa, Wosu sebanyak 3.579 jiwa itu berarti penduduk pribumi Bungku pada tahun itu sebanyak 26.288 jiwa. Selanjutnya, pada tahun yang sama penduduk Bungku yang berasal dari Eropa 1 orang, Cina di sebanyak Bahodopi sebanyak 3 jiwa, Boengkoe sebanyak 73 jiwa, *Noord-Boengkoe* sebanyak 21 jiwa, Salabangka sebanyak 50 jiwa, Wosu sebanyak 44 jiwa dengan jumlah sebanyak 191 jiwa, dari Asia timur di Boengkoe sebanyak 19, di *Noord-Boengkoe* sebanyak 4, di Salabangka sebanyak 32, dan di Wosu sebanyak 13 dengan jumlah 68 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 26.547 jiwa (Haliadi 2005).

3.2 Sistem Politik Kerajaan Bungku pada Masa Hindia Belanda (1908-1942)

Sistem politik tradisional Bungku banyak dipengaruhi oleh sistem politik Kesultanan Ternate sebab Kerajaan Bungku merupakan *vazal* Kesultanan Ternate sampai tahun 1908. Aneksasi Bungku oleh Ternate dilakukan pada masa Sultan Baabulah pada tahun 1580 ketika Sultan Ternate memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Sulawesi

Menurut tradisi struktur pemerintahan Kerajaan Bungku tertinggi berada di bawah kekuasaan raja yang gelar *Pea Pua.* Dalam menjalankan pemerintahan, *Pea Pua* dibantu oleh perangkat pemerintahan yang dibagi menjadi dua bagian, yakni *Bobatu Juniah* (pemerintahan dunia) dan *Bobatu Akherati. Bobatu Juniah* bertugas menjalankan pemerintahan dalam urusan "duniawi", mereka terdiri dari: *Kumisi Opaa* (Komisi Empat), *Soa Sio Sangaji* (Kepala Kampung dari Sembilan wilayah), *Sangaji Hopulu Ka Orua* atau Sangaji Dua Belas (Kepala Kampung dari Dua Belas Wilayah) dan *Juru Tulis* atau *Sekretaris.* Struktur pemerintahan tradisional ini berfungsi menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Bungku.

Sesuai namanya *Kumisi Opaa* beranggotakan empat orang, yakni *Jogugu*, *Kapitan Laut*, *Hukum Soa Sio* dan *Hukum Sangaji. Jogugu* merupakan pimpinan dari *Kumisi Opaa. Jogugu* juga berkedudukan sebagai perdana menteri sekaligus sebagai wakil raja dalam berbagai urusan pemerintahan. Jogugu juga merangkap jabatan sebagai Kepala Distrik Bungku Selatan. *Kapitan Laut* bertugas sebagai koordinator keamanan, semacam menteri pertahanan. Tugasnya yang lain sebagai koordinator ke-syahbandar-an. Selain itu, ia juga merangkap jabatan sebagai Kepala Distrik Bungku Utara. *Hukum Soa Sio* bertugas mengurusi berbagai persoalan dalam negeri (semacam menteri dalam negeri) sekaligus sebagai penasehat raja. *Hukum Sangaji* bertugas mengatur daerah kekuasaan kerajaan di bagian selatan (sekarang wilayah Bungku Selatan dan Menui Kepulauan. Dengan demikian, aparat pemerintahan kerajaan Bungku tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara tradisional melainkan juga menjalankan posisinya sebagai aparatur kolonial.

Soa Sio Sangaji merupakan kepala daerah dari sembilan wilayah kekuasaan Bungku, yakni (1) *Gimalaha Marsaoleh*; (2) *Sangaji Tobungku*; (3) *Gimalaha Bajo*; (4) *Hukum Mendui*; (5) *Sangaji*

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Tofuti; (6) *Sangaji To Matano; (7) Gimalaha To Lobani; (8) Lutunani Tofoiso.* Adapun *Sangaji Hopulu Ka Orua* merupakan kepala daerah dari dua belas wilayah kekuasaan Bungku, yakni: *Sangaji Lobota; (2) Sangaji Baho Umumpa; (3) Sangaji Pu'ung Keu; (4) Sangaji Bahong Kuluri; (5) Sangaji Tangofa; (6) Sangaji One Ete; (7) Sangaji Tandaoleo; (8) Sangadji Torete; (9) Sangadji Bulele; (10) Sangaji Lalampu; (11) Sangaji Faja;* dan *(12) Sangaji Matarape* (Goedhart 1908).

Untuk urusan keagamaan menjadi tugas dari *Bobatu Akherati* yang terdiri dari seorang *Kale* atau Kadhi Kerajaan, *Imamu Opaa* suatu komisi yang terdiri dari empat orang imam yaitu *Imamu Marsaoleh, Imamu Kontoba, Imamu Bajo,* dan *Imamu Tobungku.* Kadhi dan *Imamu Opaa* bertugas sebagai Hakim Syara kerajaan dan bertugas menangani persoalan menyangkut hukum agama. Selain itu, tiap kampung juga memiliki pegawai syara', berupa imam dan perangkatnya.

Pemilihan raja Bungku dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi. *Pertama,* para calon raja diseleksi oleh *Soa Sio Sangaji. Kedua,* Hasil Seleksi Soa Sio Sangaji akan dilanjutkan dengan seleksi yang dilakukan oleh *Sangaji Hopulu Ka Orua*. *Ketiga,* hasil seleksi dari *Sangaji Hopulu Ka Orua* akan diberikan kepada *Kumisi Opaa* yang akan memilih dan menetapkan raja yang baru (Mahid 2005).

Raja atau *Pea Pua* memiliki beberapa keistimewaan, antara lain mendapatkan upeti dari masyarakat. Dalam laporan Goedhart disampaikan bahwa daerah-daerah yang wajib mengirimkan pajak dan upeti berupa padi kepada raja Bungku, yakni: Tironga, To-kalla, To-watoe,To-bahoe, To kandiendi, To-pogaroe, To pada, Ipi, Bahomohoni,, Boengi, Tombelala, Matangkoni, Oengsongi, Nambo, Lara-oewé, Kolono, Sioem-batoe dan Tindé Tinia. Jumlah keseluruhan upeti itu mencapai 50 (lima puluh) *pikul*, jika diuangkan harga 1 (satu) *pikul* seharga *ƒ* 5.-. Jadi jumlah keseluruhan mencapai *ƒ* 250,-. Dari jumlah tersebut, raja mendapat bagian sebesar 36 *pikul* atau setara *ƒ* 180,-; Jogugu dan Kapitan Laut masing-masing mendapat bagian sebesar 4 ¼ *pikul* atau setara *ƒ* 22.50; Hukum Soa Sio mendapat bagian sebesar 3 *pikul* atau setara *ƒ* 15,-; dan Hukum Sangaji mendapat bagian sebesar 2 *pikul* atau setara *ƒ* 10,- (Goedhart 1908, 507–8).

Tahun 1908, secara administratif Kerajaan Bungku dapat dikatakan telah bebas dari kekuasaan Ternate. Kerajaan Bungku bersama Kerajaan Mori digabungkan sebagai sebuah *Onderafdeling Boengkoe en Mori. Onderafdeling Boengkoe en Mori* menjadi salah satu Onder Afdeling dalam wilayah *Afdeling Oost Celebes*, yang berkedudukan di Baubau. *Afdeling Oost Celebes* merupakan salah satu afdeling dalam wilayah *Gouverneur Celebes en Onderhorigheden* yang berkedudukan di Makassar. Landschap Bungku dibagi menjadi dua distrik, Noord Boengkoe (Bungku Utara) dan Zuid Boengkoe (Bungku Selatan). Sebagai Kepala Distrik Noord Boengkoe dijabat oleh *Kapitan Laut* Bungku, sedangkan Zuid Boengkoe dijabat oleh *Jogugu* Bungku.

Pada masa kekuasaan Raja Bungku, Hadji Putra Abdul Wahab (1908-1922) ditandatangani *Korte Verklaring* yang mengatur hubungan Kerajaan Bungku dengan Hindia Belanda. *Korte Verklaring* yang ditandatangani oleh Raja Abdul Wahab pada 7 Oktober 1908 atau 12 Ramadhan 1326 Masehi, disaksikan oleh *Kapitan Laut* bernama Haji Abdullah, *Hukum Soa-Sio* yang bernama *La Raja,* dan *Hukum Sangaji* yang bernama Ambari (Mahid, Haliadi-Sadi, dan Darsono 2011, 167). Dengan ditandatanganinya *Korte Verklaring* ini, dapat dikatakan Kerajaan Bungku telah merdeka dari kekuasaan Ternate dan terintegrasi dengan kekuasaan kolonial Belanda.

Untuk menjalankan dan mempertahankan kekuasaan serta pemerintahannya di Hindia Timur, Belanda ditopang dengan pilar-pilar birokrasi yang terdiri atas birokrasi kolonial Eropa atau *Binnenlandsch Bestuur* dan birokrasi tradisional pribumi atau *Inlandsche* Bestuur. Di daerah yang diperintah secara langsung (*direct rule*) seperti di Jawa dan Madura minus Vorstenlanden, kedua birokrasi ini berjalan beriringan dalam melaksanakan perintah kolonial sesuai dengan pedoman yang diterapkan dari Batavia atau Den Haag. Bagi daerah yang diperintah secara tidak langsung (*indirect rule*) seperti di kebanyakan wilayah luar Jawa, birokrasi kolonial (*Binnenlandsch Bestuur*) cenderung bersandar dan bertopang pada pemerintahan kerajaan pribumi untuk melaksanakan program

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

pemerintahan kolonial. Untuk itu jumlah korps birokrasi kolonial di luar Jawa dan Madura tidak sebanyak jumlah korps birokrasi di Jawa (Sutherland 1983). Hal ini juga terjadi di Kerajaan Bungku. Pada satu sisi, sistem pemerintahan tradisional tetap berjalan. Di sisi lain Raja beserta aparat pemerintahannya menjadi bagian dari sistem birokrasi kolonial.

Pada tahun 1924, Pemerintah Hindia Belanda kembali melakukan reorganisasi pemerintahan. Kerajaan Bungku yang sebelumnya berada dalam kekuasaan *Gouverneur Celebes en Onder Horigheden* dialihkan menjadi bagian dari Karesidenan Manado. Berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1924 No.365 dan Besluit Gubernur Jenderal No.32 tanggal 8 Agustus 1924, *Onderafdeling* Boengkoe en Mori menjadi bagian dari wilayah Afdeling Poso, Residentie Manado. *Onderafdeling* Boengkoe en Mori diubah namanya menjadi *Onderafdeling* Kolonadale. Saat itu, Afdeling Poso terbagi dalam empat *Onderafdeling*, yakni onderafdeling Tojo, *Onderafdeling* Pamona, *Onderafdeling* Lore dan *Onderafdeling* Kolonodale (Hasan dkk. 2004, 188). Kerajaan Bungku pada masa ini dibagi ke dalam lima distrik, yakni: Distrik Bahodopi, Boengkoe, Noord-Boengkoe, Salabangka, dan Wosu. Pada masa ini Kerajaan Bungku berada di bawah kekuasaan Raja Ahmad Hadi (1922-1932) dan Abdul Razak (1933-1937).

Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda kembali melakukan reorganisasi struktur pemerintahan (Lembaran Negara. *Staatblad* tahun1938 No.352). Wilayah pemerintahan luar Jawa dan Madura dibagi dalam tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan dan Provinsi Timur Besar. Untuk menata kembali wilayah pemerintahan di wilayah Provinsi Timur Besar, dikeluarkan surat keputusan pada tanggal 24 Februari 1940 No 1437 (Lembaran Negara, 1940 No 21) (Poelinggomang 2008, 146). Kerajaan Bungku pada masa ini masih tetap dibagi ke dalam lima distrik, yakni: Distrik Bahodopi, Boengkoe, Noord-Boengkoe, Salabangka, dan Wosu. Pada masa ini Kerajaan Bungku berada di bawah kekuasaan Raja Abdurrabie selaku Pejaba Sementara (*Waarnemend*) Raja Bungku (1938-1941)

3.3 Sistem Politik Kerajaan Bungku pada Masa Jepang (1942-1945)

Bertepatan pada tanggal 11 Januari 1942, bala tentara pendudukan Jepang melakukan pendaratan pertama di wilayah Indonesia, dan pada waktu itu Kota Manado sudah jatuh ke tangan Jepang. Wilayah Sulawesi Tengah termasuk para pejabat Hindia Belanda bersama tentaranya memusatkan pasukannya di kedua tempat penting di Sulawesi Tengah yakni Kota Palu dan Kota Poso.

Pemerintah pendudukan Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah. Wilayah Pulau Sumatera ditempatkan di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25, sedangkan Pulau Jawa dan Pulau Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16. Kedua wilayah ini berada di bawah Angkatan Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya bertempat di Singapura. Kemudian, Pulau Kalimantan dan pulau-pulau Indonesia bagian Timur termasuk Pulau Sulawesi dikuasai oleh Angkatan Laut (*Kaigun*) (Ricklefs 2008, 421–22). Pusat pemerintahan militer Jepang untuk Indonesia Timur berkedudukan di Makassar. Organisasi pemerintahan untuk wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian Timur disebut *Minseifu* yang dipimpin oleh pejabat yang disebut *Sokan. Minseifu* membawahi tiga wilayah yang lebih kecil yang disebut *Minseibu,* yakni: *Minsei* Kalimantan, *Minsei* Sulawesi, dan *Minsei* Seram. *Minsei* Sulawesi membawahi beberapa daerah yang lebih kecil yang pada masa Belanda di sebut Karesidenan, salah satunya Karesidenan Menado. Karesiden Manado diganti dengan istilah Jepang menjadi Manado *Syu.* Kepala pemerintahan Manado *Syu* mula-mula disebut Manado *Syucosyoco.* Mulai September 1942 disebut Manado *Sibuco*, tetapi sejak 1943 sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang disebut Manado *Syuciji* (Manus dkk. 1983, 9–10).

Di wilayah bekas Karesidenan Manado, pemerintah pendudukan Jepang tetap mempertahankan pembagian administrasi sebagaimana pada masa Belanda. Tidak ada perubahan yang cukup berarti dalam susunan tata pemerintahan, hanya saja istilah-istilah Belanda diganti

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

dengan istilah Jepang. Wilayah *Afdeling* diganti dengan sebutan *Ken* dan dipimpin oleh *Ken Kanrikan.* Wilayah *Onder Afdeling* diganti dengan sebutan *Bunkan* dipimpin oleh *Bunken Kanrikan. Landschap* atau kerajaan disebut *Su* dan raja disebut *Suco. Suco* Bungku dijabat oleh Abdurrabie. Distrik disebut *Gun* dan pimpinannya disebut *Gunco.* Distrik membawahi beberapa kampung. Kampung disebut *Son* yang dipimpin oleh *Sonco.* Kepala Kampung *(Sonco)* membawahi Kepala Jaga (semacam Kepala Dusun) yang disebut *Kuco* (Nainggolan, Laintagoa, dan Nainggolan 1982, 33–34).

Manado *Syu* membawahi beberapa *Ken,* salah satunya Poso. Poso merupakan wilayah pendudukan Jepang yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut *Ken Kanrikan*. *Ken Kanrikan* Poso sampai kapitulasi Jepang bernama Nakamura. *Ken Kanrikan* Poso membawahi beberapa *Bunken Kanrikan,* salah satunya *Bunken Kanrikan* Kolonodale. *Bunken Kanrikan* Kolonodale dijabat oleh Takaici kemudian digantikan oleh Asahi sampai masa kapitulasi. *Bunken Kanrikan* Poso mengkoordinir dua daerah kerajaan lokal yaitu Kerajaan Bungku dan Kerajaan Mori (Nainggolan, Laintagoa, dan Nainggolan 1982, 34).

Bunken Kanrikan tidak memerintah langsung tetapi melalui kekuasaan raja. Pembantu *Bunken Kanrikan* disebut *Hosakan,* yang biasanya diangkat dari penduduk setempat yang berpengalaman dan bertugas membantu *Bunken Kanrikan* dalam menjalankan pemerintahan militer. Pada situasi normal atau tidak terjadi perang, *Hosakan* juga berfungsi sebagai penghubung antara *Ken Kanrikan* dengan raja setempat *(Suco).* Sebagai bawahan dalam struktur pemerintahan *Bunken Kanrikan* adalah *Kenpetai,* seorang polisi istimewa Jepang semacam polisi militer. *Kenpetai* biasanya bertugas untuk menegakkan ketertiban secara keras, baik bagi rakyat sendiri maupun bagi militer Jepang. Pelaksana harian *Kenpetai* dilakukan oleh *Hanco,* yang juga diangkat dari penduduk setempat (Hasan dkk. 2004, 234–35).

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, petugas atau aparat pemerintahan yang dipegang oleh orang Indonesia tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya seperti biasa, tentu saja membantu aktivitas pemerintahan Jepang. Tentara Pendudukan Jepang pada prinsipnya dapat mengkolaborasi sistem pemerintahan yang dibawanya dengan sistem pemerintahan yang pernah diterapkan oleh Hindia Belanda. Dengan alasan pemerintahan pendudukan dan karena wilayah Sulawesi Tengah merupakan wilayah dari Residen Manado pada masa pemerintahan Hindia Belanda, maka semua *besluit* raja-raja yang diterbitkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dari Manado dibuatkan dalam Bahasa Jepang. Selama pendudukan tentara Jepang raja beserta aparat kerajaannya selalu saja dimanfaatkan untuk mengerahkan tenaga rakyat untuk bekerja demi kepentingan penyediaan perbekalan perang (Nainggolan, Laintagoa, dan Nainggolan 1982).

3.4 Sistem Politik Kerajaan Bungku Pascakemerdekaan Republik Indonesia

Seusai Konferensi Malino yang diselenggarakan pada tanggal 16-25 Juli 1946, pemerintah Belanda kemudian meneruskan rencana pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai upaya membentuk NIS. Untuk itu, berbagai konferensi diselenggarakan tanpa menghiraukan kecaman dan protes dari RI dan rakyat. Pada tanggal 7-24 Desember 1946 diselenggarakan Konferensi van Mook di Denpasar Bali sebagai tindak lanjut Konferensi Malino dan upaya Belanda mendirikan negara-negara bagian dalam rangka mewujudkan NIS. Konferensi Denpasar melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT). NIT adalah negara boneka pertama bikinan Belanda dalam rangka pembentukan NIS. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil-wakil sebagai berikut; dari Sulawesi Selatan (20 orang), Minahasa/Sulawesi Utara (3 orang), Sulawesi Tengah (6 orang), Bali (7 orang), dan Sumbawa (3 orang), dan yang tidak hadir pada waktu itu adalah perwakilan dari Maluku Utara. Utusan Sulawesi Tengah yang menghadiri Konferensi Denpasar, yakni (1) Adrial Duma Andi Lolo, (2) Daeng Maraja Lamakarate, (3) Tjatjo Idjazah, (4) Ince Ahmad Dahlan, (5) Wongko Lemba Talasa, dan (6) Mr. I Gde Panetje.

Semua wakil-wakil yang ikut dalam Konferensi Denpasar dilantik menjadi anggota Badan Perwakilan Sementara Negara Indonesia Timur berdasarkan Keputusan Letnan Gubernur Jenderal

Hindia Belanda tanggal 14 Desember 1946. Wakil-wakil Sulawesi Tengah terdiri atas empat orang, yakni: perwakilan Afdeling Donggala yakni (1) Tjatjo Idjasa, Kepala Distrik Palu Timur, (2) Daeng Maradja Lamakarate, anggota pamong praja (bestuur assisten) di Sabang serta perwakilan Afdeling Poso, yakni (1) Wongko Lemba Talasa, anggota pamong praja di Poso; (2) Ince Achmad Dahlan, wakil Penilik Sekolah di Banggai.

Dalam naskah peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur Bab III (Peraturan Tatanegara Sementara) pasal 14 poin 5 e dituliskan sebagai berikut; "Daerah Sulawesi Tengah terdiri dari resort afdeling Poso dan Donggala, melingkupi keradjaan-keradjaan Todjo, Poso, Lore, Una-Una, Bungku, Mori, Banggai, Banawa, Tawaeli, Palu, Sigi-Dolo, Kulawi, Parigi, Moutong dan Toli-Toli, semuanya terikat satu sama lain setjara perserikatan." Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Nopember 1948 diadakan pertemuan raja-raja Sulawesi Tengah yang biasa dikenal dengan nama "Muktamar Raja-Raja Se-Sulawesi Tengah" di Parigi. Pertemuan itu dihadiri oleh: Raja Poso (W.L.Talasa), Raja Tojo (Muslaini), Raja Una-Una (Lasahido), Raja Bungku (Abd. Rabbie), Raja Tavaeli (Lamakampali), Raja Moutong (Tombolotutu), Raja Parigi (Tagunu), Raja Mori (Rumampuo), Raja Sigi-Dolo (Dg. Managa Lamakarate), Raja Banggai (S.A. Amir), Raja Palu (Tjatjo Ijazah), Raja Lore (S.Kabo), Raja Banawa (L.Lamarauna), Raja Kulawi (W.Djiloi), dan Vorzitter Zelfbestuurscommissie Tolitoli (R.M.Pusadan). Pertemuan ini menghasilkan: Penetapan Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1948, kemudian disahkan oleh Residen Manado pada tanggal 25 Januari 1949 nomor R.21/1/4. Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah menetapkan beberapa keputusan, yaitu: Pertama, bentuk pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah diarahkan pada corak otonom (setingkat daerah tingkat II). Kedua, mengangkat R.M. Pusadan sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tengah yang pertama. Mengingat karena Jumlah Swapraja Sulawesi Tengah Bagian Barat (Afdeling Donggala) lebih banyak dari pada jumlah Swapraja Bagian Timur (Afdeling Poso), maka Anak Agung Gde Agung selaku Menteri Dalam Negeri NIT memutuskan bahwa "Ketua Dewan Raja-Raja Sulawesi Tengah" adalah R.M. Pusadan dari Afdeling Donggala dan wakilnya adalah W.L. Talasa dari Afdeling Poso serta pusat pemerintahan adalah Poso. Dalam Dewan Raja-raja ini tenaga orang-orang Belanda masih tetap berfungsi membantu dalam bidang keuangan yaitu Kerlen, Sekretaris Dewan Raja adalah Spijker dan Kepala Pekerjaan Umum adalah Sagumkij.

Penataan daerah otonom bagi pemerintahan daerah berdasarkan Indische Staatsblaad No.27 tahun 1946 mengisyaratkan kepada daerah Swapraja, baik secara mandiri maupun gabungan beberapa Swapraja dapat bekerja sama untuk mengadakan Badan Legislatif berupa Dewan Pembuat Undang-Undang (Wetgevenderaad) dan Dewan yang turut Membuat Undang-Undang (Mede Wetgevenderaad). Selain itu, beberapa daerah yang terdiri dari beberapa swapraja dapat membentuk satu pemerintahan gabungan yang bertugas antara lain: memegang pemerintahan gabungan, menetapkan peraturan untuk mengatur rumah tangga pemerintahan gabungan, dan mengesahkan anggaran keuangan masing-masing swapraja.

Dengan terbentuknya Daerah Sulawesi Tengah, institusi Residen, Asisten Residen dan Gezaghebber/Controleur dihapus dan semua wewenang Asisten Residen dan sebagai wewenang Residen dialihkan ke tangan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Namun batas-batas wilayah Onderafdeling tetap dipertahankan, hanya istilahnya saja yang diganti menjadi Kepala Pemerintah Negeri (KPN), terjemahan dari *Hoofd van Plaatselijk Bestuur (HPB)*. Demikian pula Federasi Swapraja tidak mengalami perubahan, batas wilayahnya maupun wewenangnya. Hanya pimpinan atau kepalanya saja diserahkan kepada kepada Pamong Praja (Orang Indonesia). Periode tahun 1945-1950 dapat dikatakan sebagai periode transisi dalam pemerintahan republik Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Pada masa ini terjadi dualisme pemerintahan, yakni pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan NICA. Masih perlu penelitian lanjutan mengenai struktur

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

birokrasi pada masa ini, termasuk di Sulawesi Tengah. Semenjak RIS dibubarkan pada tahun 1950, maka mulai dilakukan penataan struktur birokrasi di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, daerah Sulawesi Tengah dibubarkan. Bekas wilayah daerah Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua daerah Swatantra, yakni Daerah Swatantra Donggala dan Daerah Swatantra Poso. R.M Pusadan selaku Kepala Daerah Sulawesi Tengah menyerahkan kekuasaan pemerintahan Daerah Donggala kepada Intje Naim Dg. Mamangun, sedangkan Daerah Poso diserahkan kepada Abdul Latif Dg. Masiki. Setiap Daerah Swatantra membawahi beberapa wilayah Swapraja. Swatantra dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Negeri (KPN), sedangkan wilayah Swapraja dipimpin Kepala Pemerintahan Swapraja (KPS). Dalam hal ini, Kepala Pemerintahan Swapraja dijabat oleh raja-raja setempat. Swatantra Poso membawahi beberapa Swapraja, salah satunya Swapraja Bungku. Setiap Swapraja membawahi beberapa distrik. Pada masa ini, Swapraja Bungku membawahi 5 (distrik) distrik, yakni Distrik Salabangka, Distrik Bungku/Wosu, Distrik Bahodopi, Distrik Tokala dam Distrik Wana. Tiap distrik membawahi kepala-kepala kampung. Pada masa ini ini Kerajaan Bungku masih tetap berada di bawah kekuasaan Raja Abdurrabie selaku Kepala Swapradja Bungku

Pada tahun 1957, pemerintah menggagas struktur pemerintahan yang seragam bagi penataan pemerintahan di seluruh Indonesia. Hal ini dipandang perlu mengingat kenyataan bahwa bentuk pemerintahan Swapraja menampakkan adanya dualisme dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah menghendaki pembubaran wilayah Swapraja. Pada akhirnya dihapuskannya wilayah Swapraja, maka berakhir pula kekuasaan Raja Bungku. Penghapusan Kerajaan Bungku ini melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Tengah tanggal 11 Januari 1961 No 5 (Sairin, 2016: 154). Berdasarkan surat keputusan tersebut, status Swapraja Bungku diubah menjadi Kecamatan Bungku dan menjadi bagian dari Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah. Begitu pula dengan status Raja Bungku terakhir Abdurrabie sebagai pegawai negeri Republik Indonesia.

4. SIMPULAN

Kerajaan Bungku pada periode 1908-1961 telah mengalami transformasi sistem politik dari sebelumnya berstatus sebaga kerajaan *vazal* Ternate sampai tahun 1908, lalu kemudian menjadi kerajaan otonom di bawah kekuasaan kolonial Belanda.Warisan Ternate terlihat jelas dalam bentuk, istilah dan fungsi jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan. Reorganisasi wilayah pada masa Belanda menempatkan Bungku pada wilayah *Celebes en Onderhoorigheden* (1908-1924) dan Karesidenan Manado (1924-1942). Setelah itu lalu berada di bawah kekuasaan Jepang dan kemudian pasca kemerdekaan Republik Indonesia hingga penghapusan kerajaan. Transformasi sistem politik yang terjadi dalam waktu singkat tersebut nampak dalam perubahan istilah-istilah jabatan pemerintahan. Sementara status, peran dan fungsi para pejabat kerajaan dilakukan penyesuaian sebagai bagian dari aparatur birokrasi kolonial maupun birokrasi nasional Indonesia pascakemerdekaan

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y. 1993. *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. University of Hawaii Press. http://hdl.handle.net/10125/33430.

Goedhart, O.H. 1908. "Drie Landschappen in Celebes (Banggaai, Toembongkoe en Mori) Deel 1." *Tijdschrift voor Indische Taal, Land. en Volkenkunde*, 1908.

Haliadi. 2005. "Membedah (Pathologi Sosial?) Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Bungku." Bungku, Kabupaten Morowali.

Hasan, Darwis, Syakir Mahid, dan Haliadi. 2004. *Sejarah Poso*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mahid, Syakir. 2005. "Tinjauan Budaya dan Sejarah Masyarakat Bungku." Bungku, Kabupaten Morowali.

Mahid, Syakir, Haliadi-Sadi, dan Wilman Darsono. 2011. *Sejarah Kerajaan Bungku*. Yogyakarta: Ombak.

Manus, Lauren, Sigarlaki Anthon, Robert Tandi, dan Albert E. Rompas. 1983. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*. Disunting oleh Sutrisno Kutoyo dan Adrian Lapian. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Nainggolan, Nurhayati, Daeng Patiro Laintagoa, dan R.E. Nainggolan. 1982. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah*. Disunting oleh Frans Hitipeuw dan Sutrisno Kutoyo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Nouwens, A.L. 1932. "Nota Inzake het Lanschap Boengkoe." Koleksi Arsip Mikrofilm, No. Reel 35. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Poelinggomang, Edward Lamberthus. 2008. *Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Ricklefs, Merle Calvin. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Penerbit Serambi.

Sairin, Mohammad. 2016. "Bangsawan Sigi dalam Arus Perubahan: Keluarga Lamakarate dalam Politik di Sulawesi Tengah, 1907-1982." Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.

Velthoen, Esther J. 1997. "'Wanderers, Robbers and Bad Folk': The Politics of Violence, Protection and Trade in Eastern Sulawesi 1750–1850." Dalam *The Last Stand of Asian Autonomies*, disunting oleh Anthony Reid, 367–88. London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25760-7_15.

Velthoen, Esther Joy. 2002. "Contested Coastlines: Diasporas, Trade, and Colonial Expansion in Eastern Sulawesi, 1680-1905." *Unpublished Ph. D. Thesis. Australia: Murdoch University. Available online also at: https://www. oxis. org/theses/velthoen-2002. pdf [accessed in Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia: August 10, 2018]*.